

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah usaha atau kegiatan yang terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Perkembangan perpajakan pada masa sekarang merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka dari itu penerimaan pajak terus diupayakan karena sektor perpajakan memberikan jaminan terhadap kestabilan bagi penerimaan negara. Bahkan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, penerimaan perpajakan sampai batas-batas tertentu masih dapat memberikan peranan dalam mengatasi krisis ekonomi. (sumber: statistik 60 tahun indonesia merdeka: 208).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, dimana upaya yang dilakukan adalah memperluas wajib pajak. Dalam hal ini bidang usaha perdagangan merupakan kontributor terbesar dalam total pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat memperluas wajib pajak dengan cara sosialisasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia kepada masyarakat yang melakukan usaha perdagangan, sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari pajak penghasilan migas, pajak penghasilan non-migas, PPn dan PPnBM, PBB, dan pendapatan pajak lainnya. Sumber penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah penerimaan pajak dalam negeri, khususnya yang bersumber dari pajak penghasilan.

Fungsi pajak mulai dari anggaran belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,

jembatan,sekolah, rumah sakit, kantor polisi dan lain sebagainya menggunakan uang yang berasal dari sektor perpajakan. Dengan demikian jelas bahwa peranan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Panduan Hak dan Kewajiban Pajak, 2009)

Melihat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu langkah strategis seperti melakukan perubahan peraturan perpajakan, perubahan administrasi perpajakan, intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. Pada kegiatan intensifikasi pajak, dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuannya adalah orang atau badan yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam intensifikasi pajak terdapat tiga istilah yang terkait yaitu mapping atau pemetaan, profiling atau pembuatan profil dan benchmarking atau perbandingan (Wahyudi, 2010). Jadi Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi adalah penambahan jumlah wajib pajak dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006). tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ./2007).

Kepemilikan NPWP telah diatur dalam UU KUP no 16/2013 Pasal 2 yang berisi:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).”

Jadi dalam hal ini intensifikasi pajak dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan dan kepatuhan wajib pajak, misalkan dengan cara penyuluhan langsung kepada masyarakat. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam Direktorat Jenderal Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain sebagai tanda pengenal NPWP digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak keluar negeri, sebagai syarat ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Dalam rangka kegiatan Ekstensifikasi, setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak lalu diberikan NPWP, meskipun wajib pajak belum mendaftarkan diri atau wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara pekerjaan (jabatan). Pada proses ekstensifikasi pajak akan mencari, mendata, mencermati dan menelusuri setiap tempat dan setiap masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi makro. Ekstensifikasi mikro mencakup tata cara dalam menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang mempunyai objek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar

administrasinya. Sedangkan ekstensifikasi makro adalah tata cara dalam pengenaan pajak atas subjek ataupun objek pajak yang semula belum dikenakan pajak. Proses ekstensifikasi dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, melalui perkembangan teknologi industri , perdagangan, transportasi ataupun informasi.

Pendapatan penerimaan pajak yang utama adalah pajak penghasilan baik badan maupun orang pribadi. Dengan ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak semakin meningkat dan hasilnya dapat digali dan ditingkatkan lagi, hal ini mengacu pada pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat sehingga mempunyai potensi sebagai wajib pajak.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah dan kerasahan masyarakat berurusan dengan pajak masih sangat besar. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghindar dari pembayaran pajak, walaupun sudah mempunyai penghasilan diatas PTKP. Orang pribadi atau badan selalu berusaha menghindardalam membayar pajak ataupun melunasi pajaknya. Adapaun badan usaha cenderung merasa sulit mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta menganggap sitem dan prosedur yang ada membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang.

Dalam hal ini proses ekstensifikasi sangat penting untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Karena pajak badan menjadi salah satu sektor dalam penerimaan negara, maka harus ada upaya yang dilakukan untuk menggali penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak. Dengan latar belakang tersebut maka tugas akhir ini mengambil judul “TINJAUAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI SEKTOR PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI”.

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan

dalam bidang perpajakan terutama peningkatan jumlah wajib pajak di sektor perdagangan. Maka ruang lingkup penulisan laporan yang akan diambil yaitu sebagai berikut:

1. Subjek dan objek pajak
2. Ketentuan pelaksanaan ekstensifikasi pajak
3. Pengertian dan dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi.
4. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi.
5. Tata cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak disektor perdagangan.
6. Program kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.
7. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak.
8. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari sebagai objek praktik dan wajib pajak sebagai subjek penulisan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Tugas Akhir (TA) dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak di Sektor Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, adalah :

1. Mengetahui Sistem dan cara kerja di bagian ekstensifikasi
2. Mengetahui peningkatan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari
3. Mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Tugas Akhir dengan judul, Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak di Sektor Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari adalah :

1. Digunakan sebagai bahan informasi tentang sistem dan cara kerja bagian ekstensifikasi
2. Digunakan agar masyarakat mengetahui tentang prosedur pencarian wajib pajak baru yang dilakukan pada bagian ekstensifikasi
3. Digunakan untuk menambah pengetahuan tentang ekstensifikasi

3.4. Cara Pengumpulan Data

3.4.1. Data Penelitian

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data menurut sumber dan data menurut sifatnya. Data menurut sumbernya dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/atau tidak melalui perantara. Sedangkan menurut Marzuki, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki, 2005: 55). Data primer yang diperoleh secara langsung dari karyawan dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Sedangkan menurut Marzuki, data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari biro statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki 2005:56). Dalam penulisan laporan ini data sekunder diperoleh dengan memanfaatkan milik Kantor Pelayanan Pajak lain sebagai referensi dan pembanding, membaca dan mempelajari buku-buku referensi

maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam laporan ini.

3.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Wawancara

Proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja yang dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni mengenal diri, menjelaskan maksud dari kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan (Yunus,2010:358). Wawancara harus diperoleh dalam waktu yang singkat serta bahasa yang digunakan harus jelas dan teratur. Teknik wawancara dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu:

- a. Pembicara formal wawancara ini sangat tergantung pada pewawancara sendiri, tergantung pada spontanitasnya mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, jenis ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan, pokok-pokok pertanyaan tidak perlu dipertanyakan serta berurutan. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden.

- c. Wawancara buku terbuka, jenis wawancara ini menunjukkan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajian sama untuk setiap responden. Wawancara jenis ini bermanfaat apabila yang diwawancarai jumlahnya banyak (Moleong, 2005 : 187-188).

Pada penelitian akan digunakan teknik wawancara yang menggunakan petunjuk umum wawancara dimana sebelum bertemu dengan informan, penelitian mempersiapkan berbagai hal yang akan ditanyakan sehingga berbagai hal yang ingin diketahui dapat lebih terfokus. Wawancara merupakan teknik yang paling banyak dilakukan karena mempermudah dan mempererat pemindahan informasi. Selain itu dengan wawancara permasalahan lebih cepat ditemukan. Wawancara ini dilakukan terhadap pimpinan kantor maupun karyawannya.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1998:111). Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Studi pustaka dilakukan dengan pemakaian buku-buku dengan pemakaian buku-buku perpajakan dan buku lainnya yang terkait untuk melengkapi data yang dibutuhkan sedangkan untuk data-data tertentu tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari diperoleh dari dokumen tertulis dan arsip milik Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari.

3. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kegiatan, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan (Bungin 2007: 115-117). Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang prosedur permohonan nomor pokok wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

3.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini memuat empat bab sebagai uraian pendahuluan, gambaran umum perusahaan, pembahasan prosedur permohonan nomor pokok wajib pajak.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Berisi gambaran tentang sejarah berdirinya dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, dan wilayah kerja.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi pajak, subjek dan objek pajak, ketentuan pelaksanaan ekstensifikasi pajak, pengertian dan dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, ruang lingkup dan sasaran ekstensifikasi wajib pajak, pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Semarang Candisari, tata cara perencanaan/persiapan ekstensifikasi wajib pajak, Kontribusi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka peningkatan jumlah wajib pajak, Hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan Upaya dalam mengatasi hambatan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari Laporan Tugas Akhir, berisi kesimpulan yang diuraikan pada Bab III untuk membantu pembaca lebih mudah memahami.